

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN DAN PENCEGAHAN
STUNTING TERINTEGRASI DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR
(STUDI KASUS PROGRAM DEKAPAN PKK CANTING SRIKANDI)**

Lalu Rahmadi satria Wangsa
NPP. 32.0622

Asdaf Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah
Email: rahmadisatriawangsa@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Drs. H. Suripto, M.Si
Email: ojunsuprit@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Stunting is a serious health problem that is a national priority because it impacts the quality of human resources. East Lombok Regency was recorded as having a stunting prevalence of 16.18%, exceeding the national target of 14%, thus requiring effective policy intervention efforts. **Purpose :** This research aims to determine and analyze the factors that influence the implementation of the Integrated Stunting Reduction and Prevention Acceleration Program policy, with a focus on the implementation of the Canting Srikandi PKK Dekapan Program in East Lombok Regency. **Method:** This research uses a descriptive qualitative approach. Data was obtained through in-depth interviews, observation, and documentation studies, then analyzed using data reduction techniques, data presentation, and drawing conclusions. The theory used is the theory of policy implementation from Purwanto and Sulistyastuti, which includes six main factors: policy quality, adequacy of policy input, accuracy of instruments, implementer capacity, target group characteristics and support, and environmental conditions. **Results:** The results of this research show that the implementation of the Integrated Stunting Reduction and Prevention Acceleration Program Policy implemented through the Dekapan PKK Canting Srikandi program was implemented quite well in East Lombok Regency, meeting the indicators of success of an implementation process in accordance with the concept of Purwanto's implementation theory. Research shows that the implementation of the Canting Srikandi PKK Dekapan program has gone quite well, as indicated by a decrease in numbers *stunting* in 2023 around 16.81% to 15.91% in 2024. However, there are still several obstacles that hinder its implementation. Several obstacles are faced, such as coordination between actors that is not yet optimal and limited resources. In facing these obstacles, it is necessary to increase coordination and collaboration to build a joint commitment to support accelerated reduction and prevention *stunting* in East Lombok Regency. **Conclusion :** This research concludes that successful implementation requires strengthening cross-sector collaboration and increasing joint commitment from all stakeholders to reduce stunting rates in East Lombok Regency in a sustainable manner.

Keywords : Policy Implementation, Dekapan Program, *Stunting*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Stunting merupakan permasalahan kesehatan serius yang menjadi prioritas nasional karena berdampak pada kualitas sumber daya manusia.

Kabupaten Lombok Timur tercatat memiliki prevalensi stunting sebesar 16,18%, melebihi target nasional 14%, sehingga memerlukan upaya intervensi kebijakan yang efektif. **Tujuan :** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan Program Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi, dengan fokus pada pelaksanaan Program Dekapan PKK Canting Srikandi di Kabupaten Lombok Timur. **Metode :** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan dari Purwanto dan Sulistyastuti, yang meliputi enam faktor utama: kualitas kebijakan, kecukupan input kebijakan, ketepatan instrumen, kapasitas implementor, karakteristik dan dukungan kelompok sasaran, serta kondisi lingkungan. **Hasil/Temuan :** Hasil penelitian ini menunjukkan Implementasi Kebijakan Program Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi yang dilaksanakan melalui program Dekapan PKK Canting Srikandi dilaksanakan dengan cukup baik di Kabupaten Lombok Timur memenuhi indikator keberhasilan suatu proses implementasi sesuai dengan konsep teori implementasi Purwanto. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Dekapan PKK Canting Srikandi telah berjalan cukup baik ditunjukkan dengan adanya penurunan angka *stunting* di tahun 2023 sekitar 16,81% menjadi 15,91% di tahun 2024, Namun, masih terdapat beberapa kendala yang menghambat dalam pelaksanaannya. Beberapa kendala yang dihadapi seperti koordinasi antar aktor yang belum optimal dan keterbatasan sumber daya. Dalam menghadapi hambatan tersebut perlunya peningkatan koordinasi dan kolaborasi untuk membangun komitmen bersama dalam mendukung percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* di Kabupaten Lombok Timur. **Kesimpulan :** Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi memerlukan penguatan kolaborasi lintas sektor serta peningkatan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Lombok Timur secara berkelanjutan.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Program Dekapan, *Stunting*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Stunting menjadi masalah global yang mempengaruhi setiap negara (Kundan et al., 2021). *Stunting* adalah sindrom yang menunjukkan kegagalan pertumbuhan linear, yang menjadi indikator adanya berbagai gangguan patologis yang berkaitan dengan peningkatan morbiditas dan mortalitas (Frongillo, 1999). *Stunting* merupakan masalah kesehatan masyarakat yang dapat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak juga kecerdasan dan produktivitasnya (Syahla Tiara & Ismail, 2024). *Stunting* masih menjadi masalah kesehatan multifaktoral utama di Asia Tenggara dan merupakan salah satu dampak paling umum dari kekurangan gizi kronis di seluruh dunia (Ikasari et al., 2025). *Stunting*, dikenal sebagai masalah kesehatan global yang menonjol, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah, muncul akibat kekurangan gizi yang terus-menerus dan infeksi yang sering terjadi, berdampak buruk pada perkembangan fisik, kemampuan kognitif, dan produktivitas ekonomi masa depan anak (Ramlan et al., 2025). Faktor penentu *stunting* bersifat multifaktoral, dengan faktor diantaranya yaitu pendapatan keluarga, sanitasi lingkungan, pemberian ASI eksklusif, usia ibu saat hamil, pendidikan ibu yang rendah, peningkatan usia anak, jenis kelamin anak, rumah tangga miskin, berat badan lahir rendah, usia ibu (kurang dari 20 tahun), sumber air minum, IMT ibu yang rendah, dan penyakit diare (Kolomboy et al., 2025). *Stunting* dikenal sebagai masalah kesehatan global yang menonjol, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah, muncul akibat kekurangan gizi yang terus-menerus dan infeksi yang sering terjadi, berdampak buruk pada perkembangan fisik, kemampuan kognitif, dan produktivitas ekonomi

masa depan anak. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita (anak dibawah lima tahun) akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang dan simulasi psikososial yang tidak memadai terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan (Bahrun Alfian & Labolo Muhadam, 2024).

Stunting menjadi permasalahan kesehatan prioritas nasional di Indonesia karena berdampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia. Data dari Riset Kesehatan Dasar, mencatat angka sekitar 24,4% pada tahun 2021. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 mencatat adanya penurunan angka *stunting* di Indonesia menjadi 21,6%, turun 2,8 poin dari 24,4% dari prevalensi tahun 2021. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, angka *stunting* di Indonesia tahun 2023 tercatat sebesar 21,5%. Hanya turun 0,1 persen dari tahun sebelumnya. Angka ini masih jauh dari target penurunan *stunting* sebesar 14%. *Stunting* berpotensi memengaruhi generasi berikutnya, seperti menyebabkan berat badan lahir yang rendah pada keturunannya (Kurnia Lintang Larasati & Bambang Budi Raharjo, 2024). Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya Kabupaten Lombok Timur, termasuk wilayah dengan angka prevalensi stunting tinggi, Survey Kesehatan Indonesia (SKI) pada tahun 2021, Lombok Timur menduduki peringkat pertama sebagai kabupaten dengan prevalensi *stunting* tertinggi di Provinsi NTB yaitu sekitar 37,6%. Posisi ini mencerminkan tingginya jumlah anak yang mengalami *stunting* di Lombok Timur dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Selanjutnya tahun 2022, Lombok Timur berhasil turun ke peringkat kedua, dengan prevalensi 35,6%. Kemudian pada tahun 2023, Lombok Timur turun ke peringkat ketiga dengan prevalensi *stunting* sebesar 27,6% (SKI, 2022). Sedangkan prevalensi stunting Kabupaten Lombok Timur menurut E-PPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) pada tahun 2023 berada di angka 16,18%. Data ini mencerminkan tantangan yang masih dihadapi oleh Kabupaten Lombok Timur perihal peningkatan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat khususnya pada kelompok anak balita. Angka ini sekaligus menjadi indikator penting bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat upaya pencegahan stunting melalui program-program intervensi gizi, perbaikan pola asuh, peningkatan akses sanitasi, serta edukasi masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan gizi sejak dini.

Salah satu tahapan dari kebijakan publik adalah implementasi. Implementasi pelaksanaan atau penerapan setelah proses penetapan kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan penerapan atau pelaksanaan suatu program yang sebelumnya sudah disahkan keputusannya oleh pemerintah atau aktor pembuat kebijakan untuk menjawab permasalahan yang ingin diselesaikan (Putra, F.P., & Nangameka, T.I., 2018). Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah menjalankan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* sebagai bentuk komitmen dalam mendukung program nasional untuk menurunkan angka *stunting* di Indonesia. Target utama dalam peraturan ini adalah menurunkan prevalensi *stunting* nasional menjadi 14%. Menindaklanjuti Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tersebut, Bupati Lombok Timur mengeluarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi dengan tujuan untuk mengurangi angka *stunting* di Lombok Timur. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2023, mengatur penanganan *stunting* dengan mengintegrasikan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif sesuai dengan pedoman Perpres 72/2021. Salah satu implementasi konkret kebijakan ini adalah **Program Dekapan PKK Canting Srikandi**, yang mengintegrasikan aspek ketahanan pangan, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan layanan kesehatan selama 1000 hari pertama kehidupan anak. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan percepatan

penurunan dan pencegahan stunting terintegrasi dengan studi kasus pada Program Dekapan PKK Canting Srikandi di Kabupaten Lombok Timur.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan *stunting* di Indonesia, termasuk di Kabupaten Lombok Timur, masih menjadi tantangan serius. Data menunjukkan bahwa angka prevalensi stunting di Lombok Timur mengalami tren penurunan namun masih belum mencapai target nasional 14%. Hal ini menunjukkan tantangan dalam implementasi kebijakan yang menandakan adanya kesenjangan antara kebijakan yang ditetapkan dan hasil yang dicapai di lapangan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu terkait Implementasi Kebijakan pencegahan dan penurunan *stunting*. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Nggreni, Lusiana Andriani Lubis, Heri kusmanto pada tahun 2022 (Anggreni et al., 2022) menemukan bahwa Implementasi program Pencegahan *stunting* di Puskesmas Dolok Sigumpulon Kabupaten Padang Lawas Utara sudah dilaksanakan dengan baik namun masih belum maksimal dalam mensosialisasikan ke masyarakat sehingga masih ada sebagian masyarakat yang tidak mengerti bagaimana cara penurunan *stunting*. Selanjutnya, Swasana dan Priyanto pada tahun 2024 meneliti implementasi program perbaikan gizi masyarakat di Kota Surabaya dengan menggunakan teori van Meter dan van Horn. Hasilnya menunjukkan bahwa standar dan sasaran kebijakan atau ukuran dan tujuan kebijakan, penyuluhan atau sosialisasi kepada bumil, pemberian makanan tambahan, kegiatan atau program yang dibuat oleh kader PMT, pemanfaatan lahan yang tidak terpakai oleh pemerintah Kota Surabaya dijadikan lahan produktif, ditanam jagung dan tanaman lainnya untuk peningkatan gizi Kota Surabaya, pembinaan serta penyuluhan kepada calon suami istri yang akan menikah dalam penyuluhan bab *stunting*, sehingga setelah istrinya hamil, bisa tereduksi dengan baik. Keterlibatan aktif masyarakat dan inovasi seperti pemanfaatan lahan produktif serta pembinaan calon orang tua berperan penting dalam keberhasilan program, namun tetap diperlukan strategi komunikasi yang lebih menyeluruh.

Sementara itu, Khadizah, dkk pada tahun 2019 (Khadizah et al., 2019) melalui pendekatan mix method (kualitatif dan kuantitatif) menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor dan peran tenaga kesehatan dalam penanggulangan stunting di Desa Mangkahui. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun kebijakan berjalan dengan baik, sebagian program masih belum optimal dalam pelaksanaannya. Penelitian lain oleh Febtri Wijayantri, dkk (Wijayanti et al., 2023) menyoroti pendekatan inovatif melalui konsep “Bapak Asuh Anak Stunting” di Tambak Dahan, Subang. Penelitian ini menekankan keberhasilan inovasi sosial dalam mempercepat penurunan stunting, namun juga mencatat tantangan pelaksanaan di tingkat lokal, seperti resistensi masyarakat dan keterbatasan dukungan perangkat desa. Selanjutnya penelitian dari Sri Hajija Purba Tahun 2019 (Purba, S. H., 2019) terkait Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Desa Secanggih Kabupaten Langkat, dengan menggunakan pendekatan *mixed method* (Kualitatif dan Kuantitatif). Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penurunan stunting di Desa Secanggih sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan kebijakan Bupati Langkat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penurunan Stunting, tetapi masih ada program dari kebijakan tersebut yang belum sepenuhnya optimal, seperti pemberian ASI Eksklusif dan pemberian Inisiasi Menyusu Dini (IMD).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini mengkaji secara mendalam terkait faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan dalam konteks lokal tertentu. Penelitian tentang implementasi

kebijakan penurunan stunting di tingkat daerah, khususnya dalam program inovatif seperti Dekapan PKK Canting Srikandi di Kabupaten Lombok Timur, masih sangat terbatas. Selain itu, berdasarkan analisis bibliometrik menggunakan aplikasi VOSviewer, topik “*Stunting*” termasuk padat dikaji, tetapi keterkaitannya dengan kata kunci “Implementasi” masih tergolong rendah, menunjukkan adanya ruang kajian yang belum banyak dieksplorasi. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni menganalisis faktor-faktor implementasi kebijakan berbasis teori Purwanto dan Sulistyastuti memiliki kebaruan ilmiah dan memberikan kontribusi untuk memperluas perspektif kajian stunting dalam ranah kebijakan publik.

Penelitian ini tidak hanya menggambarkan upaya penanganan stunting, tetapi juga menganalisis secara sistematis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan hambatan dalam implementasi kebijakan. Selain itu, objek kajian yaitu Program Dekapan PKK Canting Srikandi di Kabupaten Lombok Timur merupakan program inovatif yang mengintegrasikan ketahanan pangan, peran PKK, dan layanan kesehatan, dan belum pernah dikaji secara ilmiah dalam konteks implementasi kebijakan publik. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi akademik berupa pengayaan teori implementasi kebijakan dalam konteks kebijakan kesehatan daerah, serta kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam merancang strategi yang lebih efektif untuk percepatan penurunan stunting.

Perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokus dari masing-masing penelitian sebelumnya dengan yang peneliti lakukan. Adapun perbedaan lain dari penelitian sebelumnya menggunakan metode campuran atau *mix methode* yaitu penggabungan antara kualitatif dan kuantitatif serta perbedaan teori yang digunakan. Penelitian yang peneliti lakukan yaitu analisis faktor-faktor yang memengaruhi sebuah implementasi program penurunan *stunting* yang ditinjau melalui konsep teori Implementasi Purwanto dalam upaya percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* di Kabupaten Lombok Timur.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor Faktor Yang Memengaruhi Implementasi Kebijakan Program Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Lombok Timur, khususnya program Dekapan PKK Canting Srikandi dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi Faktor-Faktor penghambat Implementasi Kebijakan Program Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Lombok Timur, khususnya program Dekapan PKK Canting Srikandi.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena untuk menjelaskan, menggambarkan, dan mendeskripsikan masalah di lapangan secara menyeluruh dengan menggunakan fakta dan data (Simangunsong, 2017). Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan Program Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Lombok Timur, khususnya melalui Program Dekapan PKK Canting Srikandi. Pemilihan pendekatan ini dilakukan agar peneliti dapat mengeksplorasi lebih dalam proses pelaksanaan Program Dekapan PKK Canting Srikandi di Kabupaten Lombok Timur secara komprehensif, termasuk interaksi antaraktor, konteks kebijakan, serta berbagai tantangan dan dukungan yang terjadi selama implementasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma penelitian *Post-Positivisme* sebagaimana menurut Creswell, paradigma penelitian ini lebih menekankan pada pengujian teori menggunakan data yang objektif dan dapat dianalisis secara sistematis (Creswell, 2017). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam,

observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Penentuan Informan dipilih menggunakan teknik *Purposive Sampling* dan *Snowball Sampling*, yang berarti informan dipilih berdasarkan pertimbangan khusus atau paling memahami terkait permasalahan yang relevan dengan objek penelitian serta *Snowball Sampling* yakni informan yang ditetapkan atau dipilih secara acak yang akan semakin berkembang, atau penambahan informan disesuaikan dengan kecukupan dan kebutuhan data oleh peneliti. Informan terdiri dari pejabat pemerintah daerah, pelaksana program, kader PKK, serta kelompok sasaran atau masyarakat penerima manfaat. Informan kunci dalam penelitian ini meliputi Pj. Bupati Lombok Timur, Kepala Dinas Kesehatan, Ketua TP PKK, dan Kepala Bappeda, karena mereka berperan strategis dalam perumusan dan koordinasi kebijakan. Total informan dalam penelitian ini berjumlah 26 orang. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara dan pedoman observasi, yang dirancang berdasarkan indikator-indikator dari teori implementasi kebijakan milik Purwanto dan Sulistyastuti (2012). Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur, Perangkat Daerah terkait, dan Masyarakat di Kabupaten Lombok Timur. Lokasi dipilih karena relevansi tingkat prevalensi stunting yang tinggi serta keberadaan program inovatif yang menjadi fokus penelitian. Penelitian berlangsung pada 6 Januari hingga 25 Januari 2025.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dekapan PKK Canting Srikandi (Dengan Ketahanan Pangan, PKK dan Kesehatan, Cegah Stunting Di Seribu Hari Kehidupan Dini) adalah program penurunan stunting di Kabupaten Lombok Timur yang merupakan program kegiatan kerja sama Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, TP. PKK, dan lintas sektoral lainnya secara berjenjang dalam upaya penurunan dan pencegahan stunting secara terintegrasi di Kabupaten Lombok Timur. Biaya penyelenggaraan program ini merupakan sharing anggaran dari Dinas Ketahanan Pangan dan TP. PKK Kabupaten Lombok Timur. Sumber pendanaan Dinas Ketahanan Pangan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Sedangkan sumber pendanaan dari TP. PKK berasal dari Dana APBD yang dihibahkan ke TP. PKK Kabupaten. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pemberian edukasi dan pemberian PMT pemulihan serta penanaman bibit tanaman sayur-mayur kepada 500 sasaran baduta dan 150 sasaran ibu hamil resiko tinggi dalam kategori Kekurangan Energi Kronik (KEK) yang tersebar di 21 Kecamatan, tepatnya di 30 desa lokus stunting tahun 2024 dan 16 desa/kelurahan lokus tahun 2023 yang masih menjadi zona merah stunting. Berikut adalah hasil penelitian dan pembahasan yang penulis dapatkan dari lokus penelitian berdasarkan dimensi yang sudah disesuaikan dengan teori sebagai berikut:

3.1 Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Implementasi Kebijakan Program Percepatan Penurunan Dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi Di Kabupaten Lombok Timur (Studi Kasus Program Dekapan Pkk Canting Srikandi).

3.1.1. Kualitas Kebijakan

3.1.1.1. Kejelasan Tujuan

Kejelasan tujuan dari implementasi program Dekapan PKK canting Srikandi sudah cukup jelas. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat telah dilakukan dengan baik, ditunjukkan melalui keaktifan kader dalam memberikan penyuluhan dan tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan. Implementasi program Dekapan PKK Canting Srikandi di Kabupaten Lombok Timur memiliki tujuan utama untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Lombok Timur dengan fokus pada perbaikan gizi masyarakat dan ketahanan pangan rumah tangga.

3.1.1.2. Kejelasan Implementor atau Penanggung Jawab

Program Dekapan PKK Canting Srikandi di Kabupaten Lombok Timur melibatkan berbagai instansi dan organisasi yang jelas dan bekerja sama secara terstruktur untuk mencapai tujuan percepatan penurunan dan pencegahan stunting. Beberapa instansi utama yang berkontribusi dalam program ini adalah Dinas Ketahanan Pangan (DKP), Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Tim Penggerak PKK (TP PKK), serta BAPPEDA dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD).

3.1.2. Kecukupan Input Kebijakan

3.1.2.1. Ada Tidaknya Dukungan Anggaran yang memadai

Program Dekapan PKK Canting Srikandi di Kabupaten Lombok Timur didukung dengan fasilitas penunjang pelaksanaan program. Selain itu juga, program ini didukung oleh alokasi anggaran yang berasal dari berbagai instansi yang terlibat langsung. Sumber utama anggaran program ini adalah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan (DKP). Dukungan anggaran dari PKK juga signifikan yang dikelola oleh POKJA 4 PKK untuk mendukung berbagai aktivitas program, termasuk sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat.

3.1.2.2. Besarnya Anggaran Dilihat Sebagai Media Untuk Melihat Komitmen Pemerintah Terhadap Suatu Kebijakan

Anggaran yang mendukung Program Dekapan PKK Canting Srikandi dinilai mampu mendukung keberhasilan implementasi program. Dukungan anggaran dari berbagai pihak, terutama Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), telah menjadi pondasi utama untuk menjalankan program ini. Dengan pendekatan memadukan anggaran dari berbagai OPD yang terlibat, program ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak yang signifikan bagi sasaran.

3.1.3. Ketepatan Instrumen Untuk Keberhasilan Suatu Tujuan

3.1.3.1. Ketepatan Instrumen

Program Dekapan PKK Canting Srikandi merupakan salah satu upaya strategis untuk percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Lombok Timur. Program ini dirancang dengan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai instrumen dan metode untuk mendukung sasaran, yaitu ibu hamil dan bayi di bawah dua tahun (baduta), dalam meningkatkan pemahaman dan praktik terkait pemenuhan gizi keluarga. Melalui kombinasi edukasi, subsidi nutrisi, dan pemberian bibit tanaman, program Dekapan PKK Canting Srikandi tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan gizi sasaran, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang sebagai langkah pencegahan stunting yang berkelanjutan.

3.1.4. Kapasitas Implementor

3.1.4.1. Struktur Organisasi

Program Dekapan PKK Canting Srikandi di Kabupaten Lombok Timur memiliki struktur organisasi yang dibentuk secara formal melalui Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 100.3.3.2/006.a/KP/2024. Struktur ini diwujudkan dalam pembentukan Tim Dekapan PKK Canting Srikandi, yang menjadi wadah koordinasi lintas sektor untuk mendukung implementasi program.

3.1.4.2. Efisiensi Hierarki Struktur Organisasi

Keberadaan tim yang terstruktur berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/006.a/KP/2024, efektif dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program Dekapan PKK Canting Srikandi. Pembentukan Tim Dekapan PKK Canting Srikandi telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam pelaksanaan program percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Lombok Timur.

3.1.4.3. Dukungan SDM, Koordinasi, dan Pengawasan

Pelaksanaan Program Dekapan PKK Canting Srikandi didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan berpengalaman sesuai bidang masing-masing. Tim yang terlibat terdiri dari tenaga teknis yang memiliki keahlian di bidang kesehatan, gizi, ketahanan pangan, dan pemberdayaan masyarakat. Koordinasi antar pihak yang terlibat, baik di tingkat OPD, PKK, maupun pihak terkait lainnya, dinilai sangat efektif. Dari sisi pengawasan, program ini menerapkan mekanisme monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan secara rutin setiap 15 hari. Pengawasan ini mencakup evaluasi terhadap sasaran. Selain itu, monev juga digunakan untuk mengidentifikasi kekurangan dalam pelaksanaan program sehingga perbaikan dapat segera dilakukan.

3.1.5. Karakteristik dan Dukungan Kelompok Sasaran

3.1.5.1. Kelompok sasaran adalah individu atau kelompok

Kelompok sasaran utama dari Program Dekapan PKK Canting Srikandi adalah ibu hamil yang mengalami Kekurangan Energi Kronik (KEK) dan Bayi di Bawah Dua Tahun (Baduta) 6 sampai 23 bulan yang termasuk dalam kategori *wasting* atau stunting.

3.1.5.2. Pengaruh Karakteristik Kelompok Sasaran Terhadap Proses Implementasi

Kelompok sasaran program Dekapan PKK Canting Srikandi memiliki karakteristik yang beragam, yang sangat memengaruhi proses implementasi Program Dekapan PKK Canting Srikandi. Program Dekapan PKK Canting Srikandi dirancang secara selaras dengan berbagai karakteristik sasaran, baik dari aspek pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, tingkat partisipasi dan antusias masyarakat menyambut program. Pemahaman terhadap keberagaman karakteristik kelompok sasaran ini membantu implementasi program menjadi lebih efektif, khususnya melalui edukasi yang tepat sasaran, koordinasi lintas sektor, dan pendekatan berbasis budaya lokal. Hal ini menunjukkan bahwa keberagaman karakteristik kelompok sasaran bukan hanya tantangan, tetapi juga peluang untuk menciptakan intervensi yang lebih inklusif dan berdampak serta tepat sasaran.

3.1.6. Kondisi Lingkungan Geografi, Sosial, ekonomi, dan Politik

Kondisi lingkungan yang kondusif memainkan peran penting dalam mendukung implementasi Program Dekapan PKK Canting Srikandi. Faktor lingkungan ini mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, geografi yang saling berkaitan untuk menciptakan keberhasilan program. Dari aspek sosial, dukungan dari keluarga, tetangga, dan masyarakat memberikan dampak signifikan. Lingkungan keluarga yang harmonis, seperti dukungan suami kepada istri hamil, perhatian dari anggota keluarga besar, dan informasi yang disebarkan oleh komunitas PKK, membantu menciptakan kesadaran tentang pentingnya pencegahan stunting. Sebaliknya, lingkungan yang kurang suportif, seperti stigma dari tetangga atau minimnya pemahaman, dapat menghambat keberhasilan implementasi program Dekapan PKK Canting Srikandi. Dukungan politik terhadap Program Dekapan PKK Canting Srikandi di Kabupaten Lombok Timur terwujud melalui komitmen kuat dari pemerintah daerah. Keterlibatan

aktif para pemangku kepentingan politik dalam kegiatan sosialisasi dan monitoring program menunjukkan komitmen dalam mendukung program.

3.1.7. Hasil Implementasi Kebijakan Program Dekapan PKK Canting Srikandi

Implementasi Program Dekapan PKK Canting Srikandi menunjukkan hasil yang positif dalam mendukung kebijakan percepatan penurunan dan pencegahan stunting terintegrasi di Kabupaten Lombok Timur. Kondisi ini ditunjukkan dengan adanya perbaikan status gizi sasaran baik ibu hamil KEK maupun baduta wasting dan stunting. Berdasarkan data Laporan Pemantauan Perubahan Status Gizi Program Dekapan PKK Canting Srikandi, dari 150 ibu hamil dengan Kekurangan Energi Kronis (KEK) yang menjadi sasaran program Dekapan PKK Canting Srikandi, Sebanyak 85 orang (56,6%) telah mengalami perubahan status menjadi normal (tidak KEK). Demikian juga baduta *Wasting* dan *Stunting*, dari total 500 Baduta yang menjadi sasaran, terdiri atas 215 baduta *Wasting* dan 363 Baduta *Stunting*. Mengapa demikian, karena diantara sasaran tersebut terdapat Baduta yang mengalami *Wasting* dan juga *Stunting* sekaligus sejumlah 154 Baduta. Setelah dilakukan intervensi terjadi perbaikan status gizi (menjadi normal) dari sasaran baduta. Secara rinci, dari 215 Baduta *Wasting*, sebanyak 152 Baduta (70,70%) telah mengalami perbaikan status gizi menjadi Normal. Kemudian dari 363 Baduta *Stunting*, sebanyak 140 Baduta (38,57%) mengalami perubahan status gizi menjadi Normal. Perubahan kondisi baduta tersebut menunjukkan perbaikan kondisi yang cukup baik dalam upaya menekan terjadinya *Stunting*. Hal ini menunjukkan bahwa program Dekapan PKK Canting Srikandi telah memberikan kontribusi baik dalam perbaikan status gizi pada ibu hamil, baduta *wasting* dan penurunan angka *stunting* di lokasi pelaksanaan program (Dinas Kesehatan, 2025).

NO	KECAMATAN	STUNTING	%
1	2	3	4
1	KERUAK	740	14,20
2	JEROWARU	851	14,98
3	SAKRA	1.380	25,66
4	SAKRA BARAT	348	6,47
5	SAKRA TIMUR	178	4,74
6	TERARA	1.077	18,15
7	MONTONG GADING	582	14,46
8	SIKUR	1.750	27,74
9	MASBAGIK	1.373	15,64
10	PRINGGASELA	906	15,33
11	SUKAMULIA	690	23,95

NO	KECAMATAN	STUNTING	%
1	2	3	4
12	SURALAGA	1.047	16,58
13	SELONG	896	13,45
14	LABUHAN HAJI	1.069	19,94
15	PRINGGABAYA	1.852	18,62
16	SUELA	469	11,92
17	AIKMEL	792	11,89
18	LENEK	330	7,61
19	WANASABA	725	11,49
20	SEMBALUN	362	14,17
21	SAMBALIA	921	23,10
	KABUPATEN LOMBOK TIMUR	18.338	15,91

Sumber : Dinas Kesehatan Lombok Timur, (Rekap Stunting per Kecamatan 2024)

Hasil implementasi program Dekapan PKK Canting Srikandi juga memberikan kontribusi terhadap penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Lombok Timur, terlihat dari penurunan prevalensi stunting dari 16,81% per Desember 2023 menjadi 15,91% per Desember 2024 (Dinas Kesehatan, 2024). Keberhasilan implementasi Program Dekapan PKK Canting Srikandi menunjukkan bahwa pendekatan secara konvergen atau bersama mampu memberikan dampak nyata dalam menurunkan angka stunting, sekaligus menjadi langkah strategis dalam menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas di Kabupaten Lombok Timur. Melalui implementasi yang konsisten dan berbasis partisipasi, Program Dekapan PKK Canting Srikandi telah menunjukkan hasil yang positif dalam mendorong penurunan angka stunting, sekaligus menciptakan pondasi untuk masa depan yang lebih sehat bagi masyarakat kabupaten Lombok Timur.

3.2 Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Program Dekapan PKK Canting Srikandi

Program Dekapan PKK Canting Srikandi dalam pelaksanaannya menghadapi beberapa tantangan yang menjadi penghambat dari Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting di Lombok Timur, beberapa tantangan yang perlu mendapat perhatian dan dikendalikan bersama agar tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan yaitu kondisi ekonomi keluarga sasaran, tingkat kehadiran kelompok sasaran menjadi kendala signifikan, Keterbatasan pemahaman sasaran, kurangnya kedisiplinan dalam koordinasi, masih adanya perbedaan pendapat antar pihak yang terlibat terkait *stunting* dan kelancaran anggaran.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Program Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Lombok Timur melalui Program Dekapan PKK Canting Srikandi telah berjalan cukup baik, terutama dalam hal koordinasi lintas sektor, pelibatan PKK, dan integrasi ketahanan pangan serta edukasi gizi

dalam 1000 hari pertama kehidupan. Namun, masih ditemukan kendala seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi antar aktor yang belum optimal, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program secara konsisten. Sama halnya dengan hasil penelitian Anggreni et al. (2022) yang meneliti implementasi program stunting di Puskesmas Dolok Sigompulon, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan yang melibatkan aktor-aktor pelaksana di tingkat lokal dapat berjalan efektif, meskipun masih terdapat tantangan dalam hal sosialisasi dan keterlibatan masyarakat secara penuh. Namun demikian, berbeda dari penelitian tersebut, temuan ini memperlihatkan bahwa program Dekapan PKK Canting Srikandi telah memiliki struktur koordinasi lintas sektor yang lebih formal melalui Keputusan Bupati, yang tidak ditemukan dalam studi Anggreni. Temuan ini juga memperkuat hasil penelitian Khadizah et al. (2019) yang menyebutkan pentingnya sinergi lintas sektor dan peran tenaga kesehatan dalam penanggulangan stunting. Dalam penelitian ini, kolaborasi antara OPD dan kader PKK, serta pendampingan oleh nutrisionis, terbukti efektif dalam memperbaiki status gizi ibu hamil KEK dan baduta. Namun, berbeda dengan Khadizah, penelitian ini menambahkan aspek ketahanan pangan sebagai instrumen pendukung yang nyata, melalui pembagian bibit tanaman dan pemanfaatan lahan rumah tangga sebagai bagian dari intervensi gizi sensitif.

Dari sisi pendekatan inovatif, penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian Wijayantri et al. (2023) yang mengkaji konsep “Bapak Asuh Anak Stunting”, di mana strategi sosial berbasis masyarakat dikembangkan untuk mendukung percepatan penurunan stunting. Namun, berbeda dengan penelitian Wijayantri et al. (2023) yang mengusung pendekatan sosial melalui konsep “Bapak Asuh Anak Stunting”, temuan penelitian ini menunjukkan pendekatan yang lebih struktural dan terintegrasi dalam kebijakan daerah. Jika konsep “bapak asuh” lebih menitikberatkan pada dukungan komunitas dan adopsi anak asuh, maka Program Dekapan PKK Canting Srikandi menekankan koordinasi lintas sektor formal yang didukung kebijakan daerah dan anggaran terpadu antar-OPD. Temuan ini juga selaras dengan penelitian Sri Hajija Purba (2019) di Desa Secanggung, Kabupaten Langkat yang menyoroti pentingnya regulasi lokal dalam mendukung pelaksanaan program stunting. Program di Kabupaten Lombok Timur dilandasi oleh Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 dan diperkuat melalui Keputusan Bupati dalam pembentukan Tim Pelaksana, menunjukkan bahwa legitimasi hukum sangat penting untuk menjamin keberlangsungan dan konsistensi pelaksanaan program. Penelitian ini juga memiliki kemiripan dari segi perwujudan regulasi. Dimana kebijakan penurunan stunting telah berjalan baik dan mengikuti regulasi daerah (Perbup Langkat Nomor 10 Tahun 2018), namun indikator implementasi yang belum optimal, seperti program ASI eksklusif dan IMD. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan memiliki kerangka yang kuat, keberhasilan di lapangan sangat ditentukan oleh pelaksanaan teknis dan dukungan masyarakat.

Sementara itu, penelitian Indra Fajar Swasana dan Priyanto (2024) yang menekankan pentingnya inovasi seperti pemanfaatan lahan produktif dan penyuluhan pranikah menunjukkan pendekatan yang lebih mikro dan berbasis pemberdayaan komunitas. Temuan penelitian ini berbeda, karena justru menunjukkan keberhasilan pendekatan makro-struktural yang dikawal pemerintah daerah melalui integrasi program, regulasi, serta koordinasi lintas sektor, bukan hanya dari sisi pemberdayaan komunitas secara mikro.

Penelitian yang peneliti lakukan memperlihatkan pendekatan yang lebih sistemik melalui implementasi kebijakan daerah terintegrasi berdasarkan teori implementasi Purwanto dan Sulistyastuti. Penelitian ini berfokus pada pendekatan teoritis yang digunakan, yakni teori implementasi kebijakan Purwanto dan Sulistyastuti, yang memungkinkan analisis mendalam terhadap enam faktor penentu implementasi. Hal ini memberikan kerangka evaluatif yang lebih luas dibandingkan penelitian sebelumnya, serta memperkaya literatur mengenai pelaksanaan kebijakan penurunan stunting di tingkat daerah dengan konteks kebijakan yang

inovatif dan kolaboratif. Ciri khas utama dari penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap faktor-faktor implementasi kebijakan berdasarkan teori implementasi kebijakan nasional yang aplikatif di tingkat daerah, serta pada objek penelitian berupa program inovatif lokal yang belum banyak dikaji dalam penelitian lain. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya kajian implementasi kebijakan, tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam merancang strategi percepatan penurunan stunting berbasis kebijakan lokal.

IV. KESIMPULAN

Implementasi Kebijakan Program Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi yang dilaksanakan melalui program Dekapan PKK Canting Srikandi sudah berhasil dilaksanakan dengan baik di Kabupaten Lombok Timur. Keberhasilan tersebut ditunjukkan melalui pemenuhan indikator berdasarkan faktor-faktor yang memengaruhi Implementasi yang terdiri dari Kualitas Kebijakan, Kecukupan Input Kebijakan, Ketepatan Instrumen Yang Dipakai Untuk Mencapai Tujuan Kebijakan, Kapasitas Implementor, Karakteristik dan Dukungan Kelompok Sasaran, serta Kondisi Lingkungan Geografis, Sosial, Ekonomi, dan Politik. Selain itu, adanya penurunan angka *stunting* di tahun 2023 sekitar 16,81% menjadi 15,91% di tahun 2024. Namun demikian, masih perlu dilakukan upaya lanjutan untuk mencapai angka stunting yang sesuai dengan target nasional. **Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki tentunya memiliki keterbatasan yang perlu diakui. Data yang diperoleh bersifat kualitatif sehingga interpretasi hasil sangat bergantung pada kedalaman informasi dari informan. Hal ini membuka kemungkinan adanya bias subjektif, baik dari peneliti maupun informan. Dalam proses pengumpulan data, terdapat keterbatasan akses terhadap informan kunci tertentu dan dokumen resmi yang dibutuhkan untuk memperkuat analisis. Selain itu, waktu pelaksanaan penelitian yang terbatas membuat pendalaman pada beberapa indikator implementasi belum sepenuhnya optimal. **Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Masih ditemukan beberapa kendala dalam penelitian ini seperti kondisi ekonomi keluarga sasaran dan keterbatasan pemahaman sasaran. Maka dari itu, peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini melalui perspektif metode penelitian yang lain dan konsep teori yang lain untuk dapat memperoleh hasil yang lebih komprehensif dan mendalam serta mungkin dapat mengembangkan model inovasi berbasis masyarakat untuk meningkatkan efektivitas program yang mendukung penanggulangan stunting di Kabupaten Lombok Timur.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih banyak diucapkan pada Pj Bupati Lombok Timur, Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur beserta jajaran, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur beserta jajaran, Kepala Dinas Ketahanan Pangan beserta jajaran, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana beserta jajaran, Nutrisionis Puskesmas, Ketua TP. PKK Kabupaten Lombok Timur, dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Timur beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu menyukseskan selama pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anggreni, D., Lubis, L. A., & Kusmanto, H. (2022). Implementasi program pencegahan stunting di puskesmas Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara. *Histeria Jurnal: Ilmiah Soshum Dan Humaniora*, 1(2), 91–99. <https://doi.org/10.55904/histeria.v1i2.281>
- Creswell, John W. (2017). Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran.

- Dikes. (2025). Laporan Pemantauan Perubahan Status Gizi Program Dekapan PKK Canting Srikandi.
- Dikes. (2024). Rekap Stunting Hasil Bulan Timbang Tiap Kecamatan di Kabupaten Lombok Timur per Desember 2024.
- Frongillo, J. (1999). Symposium: Causes and etiology of stunting. *Journal of Nutrition*, 129(2 SUPPL.).
- Hi Bahrin, Muhammad Alfian and Labolo, Muhadam (2024) *EFEKTIVITAS KEBIJAKAN MELALUI JARING PENGAMAN SOSIAL (SOCIAL SAFETY NET) PENGENDALIAN STUNTING DI KOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA*. Other thesis, IPDN. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19775>
- Ikasari, F. S., Pusparina, I., Nugraha, F. S., Abdillah, A. R., Kirana, C. I. A., & Wirandi, M. (2025). Exploration of Mother's Perception of Toddlers About Stunting: Qualitative Study. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia*, 8(3), 177–187. <https://doi.org/10.56338/mppki.v8i3.6932>
- Swasana Indra, F & Priyanto (2024). Implementasi Kebijakan Program Perbaikan Gizi Masyarakat Kategori Balita Berstatus *Stunting* di Kota Surabaya
- Kemenkes. (2022). Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022. Kemenkes, 1–7.
- Khadizah, Asrinawaty, & Rahman, E. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Penanggulangan Dalam Penurunan Stunting Di Desa Mangkahui Kabupaten Murung Raya. *Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Kalimantan*, 1–10.
- Kolomboy, F., Adhyantiws, A., Nurmiaty, N., Arsyad, G., Aminuddin, A., Faisal, T. I., Ramadhan, K., & Jun, C. H. W. (2025). Cross-Sectoral Collaboration in Stunting Prevention: Implementation in Donggala Regency, Central Sulawesi. *Journal of Public Health and Pharmacy*, 5(1), 191–199. <https://doi.org/10.56338/jphp.v6i1.6277>
- Kundan, I., Nair, R., Kulkarni, S., Deshpande, A., Jotkar, R., & Phadke, M. (2021). Assessment, outcomes and implications of multiple anthropometric deficits in children. *BMJ Nutrition, Prevention and Health*, 4(1), 267–274. <https://doi.org/10.1136/bmjnph-2021-000233>
- Kurnia Lintang Larasati, & Bambang Budi Raharjo. (2024). Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Jawa Tengah (Pelaksanaan Perpres Nomor 72 Tahun 2021). *Detector: Jurnal Inovasi Riset Ilmu Kesehatan*, 2(3), 212–219. <https://doi.org/10.55606/detector.v2i3.4173>
- Mustafa Tiara Syahla & Ismail (2024) *Strategi Dinas Kesehatan Dalam Penurunan Angka Stunting di Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo*. Other thesis, IPDN. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19100>
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*
- Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi
- Purba, S. H. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting Di Desa Secanggung Kabupaten Langkat (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Purwanto, E.A., & Sulistyastuti, D.R. (2012). Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Gave Media.

- Putra, F. P., & Nangameka, T. I. (2018). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 41-58.
- Ramlan, P., Sukri, P., Abdullah, M. T., Ibrahim, M. A., Ahmad, J., & Adri, K. (2025). A Systematic Review of Maternal and Child Health Policies in Addressing Stunting: Trends and Challenges. *Journal of Public Health and Pharmacy*, 5(1), 119–130. <https://doi.org/10.56338/jphp.v5i1.6001>
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta
- Survey Kesehatan Indonesia. (2022). *Prevalensi Stunting Indonesia*
- Wijayanti, F., Yudha, R., Carolina, C., & Saparita, R. (2023). Inovasi Sosial pada Penanganan Stunting: Penerapan Konsep Bapak Asuh Anak Stunting di Tambak Dahan, Subang, Provinsi Jawa Barat. *Sosio Konsepsia*, 12(2), 26–36. <https://doi.org/10.33007/ska.v12i2.3239>

